



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak diatur oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
16. Peraturan Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

BAB II KLASIFIKASI NJOP

Pasal 2

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Klasifikasi NJOP Bangunan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Dalam hal ini jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 3

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan untuk masing-masing Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Klasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 16 September 2013

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 16 September 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 20

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR : 20 Tahun 2013
 TANGGAL : 16 September 2013

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI UNTUK
 OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)			Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m ²)	
1	2			3	
001	>	67,390,000.00	s/d	69,700,000.00	68,545,000.00
002	>	65,120,000.00	s/d	67,390,000.00	66,255,000.00
003	>	62,890,000.00	s/d	65,120,000.00	64,000,000.00
004	>	60,700,000.00	s/d	62,890,000.00	61,795,000.00
005	>	58,550,000.00	s/d	60,700,000.00	59,625,000.00
006	>	56,440,000.00	s/d	58,550,000.00	57,495,000.00
007	>	54,370,000.00	s/d	56,440,000.00	55,405,000.00
008	>	52,340,000.00	s/d	54,370,000.00	53,355,000.00
009	>	50,350,000.00	s/d	52,340,000.00	51,345,000.00
010	>	48,400,000.00	s/d	50,350,000.00	49,375,000.00
011	>	46,490,000.00	s/d	48,400,000.00	47,445,000.00
012	>	44,620,000.00	s/d	46,490,000.00	45,555,000.00
013	>	42,790,000.00	s/d	44,620,000.00	43,705,000.00
014	>	41,000,000.00	s/d	42,790,000.00	41,895,000.00
015	>	39,250,000.00	s/d	41,000,000.00	40,125,000.00
016	>	37,540,000.00	s/d	39,250,000.00	38,395,000.00
017	>	35,870,000.00	s/d	37,540,000.00	36,705,000.00
018	>	34,240,000.00	s/d	35,870,000.00	35,055,000.00
019	>	32,650,000.00	s/d	34,250,000.00	33,445,000.00
020	>	31,100,000.00	s/d	32,650,000.00	31,875,000.00
021	>	29,590,000.00	s/d	31,100,000.00	30,345,000.00
022	>	28,120,000.00	s/d	29,590,000.00	28,855,000.00
023	>	26,690,000.00	s/d	28,120,000.00	27,405,000.00
024	>	25,300,000.00	s/d	26,690,000.00	25,995,000.00
025	>	23,950,000.00	s/d	25,300,000.00	24,625,000.00
026	>	22,640,000.00	s/d	23,950,000.00	23,295,000.00
027	>	21,370,000.00	s/d	22,640,000.00	22,005,000.00
028	>	20,140,000.00	s/d	21,370,000.00	20,755,000.00
029	>	18,950,000.00	s/d	20,140,000.00	19,545,000.00
030	>	17,800,000.00	s/d	18,950,000.00	18,375,000.00
031	>	16,690,000.00	s/d	17,800,000.00	17,245,000.00
032	>	15,620,000.00	s/d	19,690,000.00	16,155,000.00
033	>	14,590,000.00	s/d	15,320,000.00	15,105,000.00
034	>	13,600,000.00	s/d	14,590,000.00	14,095,000.00
035	>	12,650,000.00	s/d	13,600,000.00	13,125,000.00

1	2			3	
036	>	11,740,000.00	s/d	12,650,000.00	12,195,000.00
037	>	10,870,000.00	s/d	11,740,000.00	11,305,000.00
038	>	10,040,000.00	s/d	10,870,000.00	10,455,000.00
039	>	9,250,000.00	s/d	10,040,000.00	9,645,000.00
040	>	8,500,000.00	s/d	9,250,000.00	8,875,000.00
041	>	7,790,000.00	s/d	8,500,000.00	8,145,000.00
042	>	7,120,000.00	s/d	7,790,000.00	7,455,000.00
043	>	6,490,000.00	s/d	7,120,000.00	6,805,000.00
044	>	5,900,000.00	s/d	6,490,000.00	6,195,000.00
045	>	5,350,000.00	s/d	5,900,000.00	5,625,000.00
046	>	4,840,000.00	s/d	5,350,000.00	5,095,000.00
047	>	4,370,000.00	s/d	4,840,000.00	4,605,000.00
048	>	3,940,000.00	s/d	4,370,000.00	4,155,000.00
049	>	3,550,000.00	s/d	3,940,000.00	3,745,000.00
050	>	3,200,000.00	s/d	3,550,000.00	3,375,000.00
051	>	3,000,000.00	s/d	3,200,000.00	3,100,000.00
052	>	2,850,000.00	s/d	3,000,000.00	2,925,000.00
053	>	2,708,000.00	s/d	2,850,000.00	2,779,000.00
054	>	2,573,000.00	s/d	2,708,000.00	2,640,000.00
055	>	2,440,000.00	s/d	2,573,000.00	2,508,000.00
056	>	2,261,000.00	s/d	2,440,000.00	2,352,000.00
057	>	2,091,000.00	s/d	2,261,000.00	2,176,000.00
058	>	1,934,000.00	s/d	2,091,000.00	2,013,000.00
059	>	1,789,000.00	s/d	1,934,000.00	1,862,000.00
060	>	1,655,000.00	s/d	1,789,000.00	1,722,000.00
061	>	1,490,000.00	s/d	1,655,000.00	1,573,000.00
062	>	1,341,000.00	s/d	1,490,000.00	1,415,000.00
063	>	1,207,000.00	s/d	1,341,000.00	1,274,000.00
064	>	1,086,000.00	s/d	1,207,000.00	1,147,000.00
065	>	977,000.00	s/d	1,086,000.00	1,032,000.00
066	>	855,000.00	s/d	977,000.00	916,000.00
067	>	748,000.00	s/d	855,000.00	802,000.00
068	>	655,000.00	s/d	748,000.00	702,000.00
069	>	573,000.00	s/d	655,000.00	614,000.00
070	>	501,000.00	s/d	573,000.00	537,000.00
071	>	426,000.00	s/d	501,000.00	464,000.00
072	>	362,000.00	s/d	426,000.00	394,000.00
073	>	308,000.00	s/d	362,000.00	335,000.00
074	>	262,000.00	s/d	308,000.00	285,000.00
075	>	223,000.00	s/d	262,000.00	243,000.00
076	>	178,000.00	s/d	223,000.00	200,500.00
077	>	142,000.00	s/d	178,000.00	160,000.00
078	>	114,000.00	s/d	142,000.00	128,000.00
079	>	91,000.00	s/d	114,000.00	103,000.00

1		2		3	
080	>	73,000.00	s/d	91,000.00	82,000.00
081	>	55,000.00	s/d	73,000.00	64,000.00
082	>	41,000.00	s/d	55,000.00	48,000.00
083	>	31,000.00	s/d	41,000.00	36,000.00
084	>	23,000.00	s/d	31,000.00	27,000.00
085	>	17,000.00	s/d	23,000.00	20,000.00
086	>	12,000.00	s/d	17,000.00	14,000.00
087	>	8,400.00	s/d	12,000.00	10,000.00
088	>	5,900.00	s/d	8,400.00	7,150.00
089	>	4,100.00	s/d	5,900.00	5,000.00
090	>	2,900.00	s/d	4,100.00	3,500.00
091	>	2,000.00	s/d	2,900.00	2,450.00
092	>	1,400.00	s/d	2,000.00	1,700.00
093	>	1,050.00	s/d	1,400.00	1,200.00
094	>	760.00	s/d	1,050.00	910.00
095	>	550.00	s/d	760.00	660.00
096	>	410.00	s/d	550.00	480.00
097	>	310.00	s/d	410.00	350.00
098	>	240.00	s/d	310.00	270.00
099	>	170.00	s/d	240.00	200.00
100	>	170.00	s/d		140.00

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR : 20 Tahun 2013
 TANGGAL : 16 September 2013

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BANGUNAN UNTUK
 OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)			Nilai Jual Obyek Pajak (Rp/m ²)
1	2			3
001	>	14,700,000.00	s/d 15,800,000.00	15,250,000.00
002	>	13,600,000.00	s/d 14,700,000.00	14,150,000.00
003	>	12,550,000.00	s/d 13,600,000.00	13,075,000.00
004	>	11,550,000.00	s/d 12,550,000.00	12,050,000.00
005	>	10,600,000.00	s/d 11,550,000.00	11,075,000.00
006	>	9,700,000.00	s/d 10,600,000.00	10,150,000.00
007	>	8,850,000.00	s/d 9,700,000.00	9,275,000.00
008	>	8,050,000.00	s/d 8,850,000.00	8,450,000.00
009	>	7,300,000.00	s/d 8,050,000.00	7,675,000.00
010	>	6,600,000.00	s/d 7,300,000.00	6,950,000.00
011	>	5,850,000.00	s/d 6,600,000.00	6,225,000.00
012	>	5,150,000.00	s/d 5,850,000.00	5,500,000.00
013	>	4,500,000.00	s/d 5,150,000.00	4,825,000.00
014	>	3,900,000.00	s/d 4,500,000.00	4,200,000.00
015	>	3,350,000.00	s/d 3,900,000.00	3,625,000.00
016	>	2,850,000.00	s/d 3,350,000.00	3,100,000.00
017	>	2,400,000.00	s/d 2,850,000.00	2,625,000.00
018	>	2,000,000.00	s/d 2,400,000.00	2,220,000.00
019	>	1,666,000.00	s/d 2,000,000.00	1,833,000.00
020	>	1,366,000.00	s/d 1,666,000.00	1,516,000.00
021	>	1,034,000.00	s/d 1,366,000.00	1,200,000.00
022	>	902,000.00	s/d 1,034,000.00	968,000.00
023	>	744,000.00	s/d 902,000.00	823,000.00
024	>	656,000.00	s/d 744,000.00	700,000.00
025	>	534,000.00	s/d 656,000.00	595,000.00
026	>	476,000.00	s/d 534,000.00	505,000.00
027	>	382,000.00	s/d 476,000.00	429,000.00
028	>	348,000.00	s/d 382,000.00	365,000.00
029	>	272,000.00	s/d 348,000.00	310,000.00
030	>	256,000.00	s/d 272,000.00	264,000.00
031	>	194,000.00	s/d 256,000.00	225,000.00
032	>	188,000.00	s/d 194,000.00	191,000.00
033	>	136,000.00	s/d 188,000.00	162,000.00
034	>	128,000.00	s/d 136,000.00	132,000.00
035	>	104,000.00	s/d 128,000.00	116,000.00

1	2			3	
036	>	62,000.00	s/d	104,000.00	98,000.00
037	>	74,000.00	s/d	62,000.00	83,000.00
038	>	68,000.00	s/d	74,000.00	71,000.00
039	>	52,000.00	s/d	68,000.00	60,000.00
040	>	52,000.00	s/d		50,000.00

BUPATI PASAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
TENTANG KLSIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN**

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pengesahan oleh Bupati tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP atas permukaan bumi dan/atau bangunan.

B. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak yang Terkait

- a. Bupati.
- b. Kepala Dinas Pendapatan.
- c. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan.
- d. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
- e. Tenaga Penilai PBB.
- f. Pelaksana.
- g. Pihak Terkait.

D. Dokumen yang digunakan :

- a. Surat usulan/konsep Lampiran Surat Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB;
- b. Uraian Penelitian.

E. Dokumen yang Dihasilkan :

Surat Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan beserta lampirannya.

F. Prosedur Kerja :

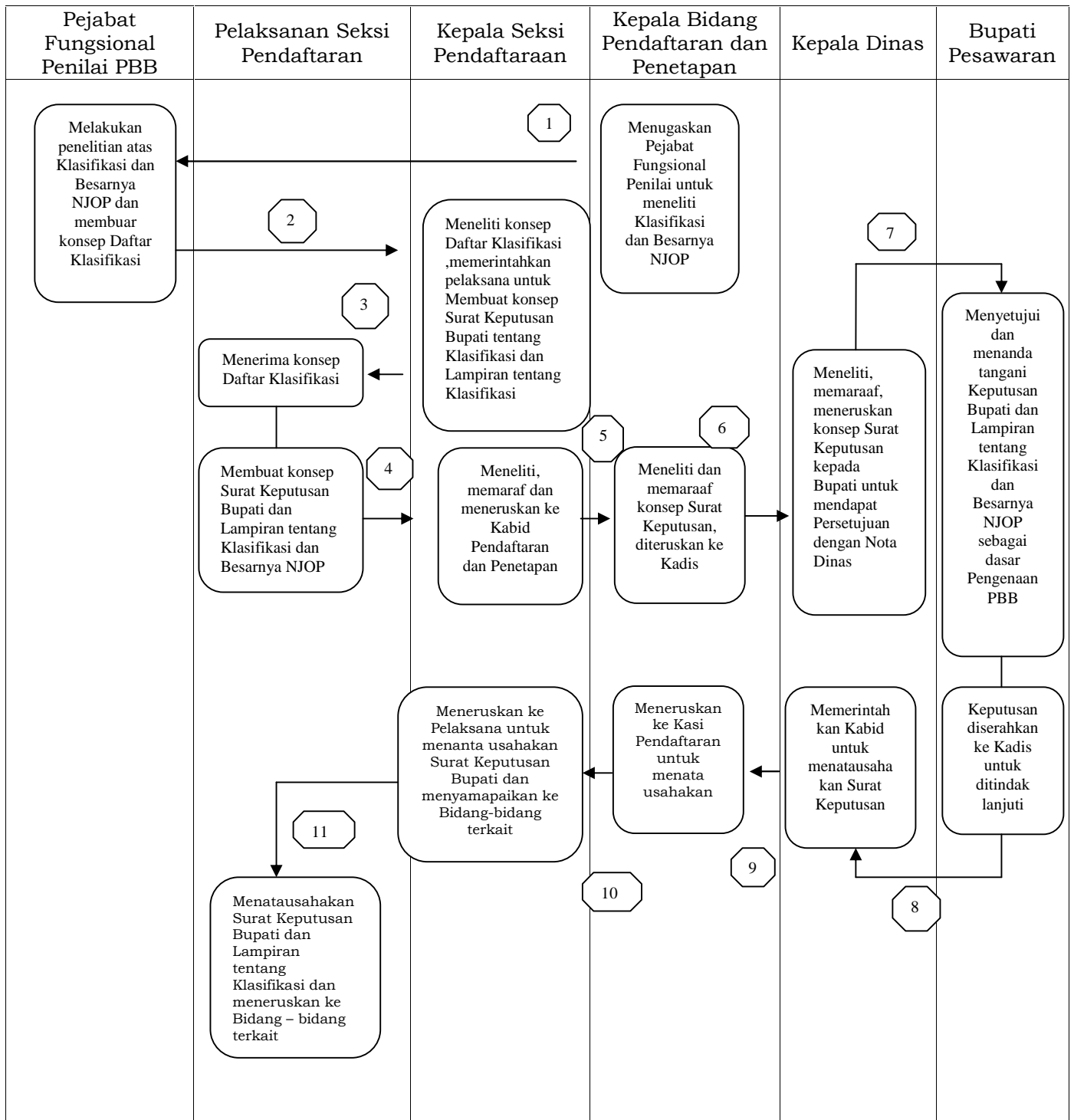
- a. Kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan menugaskan Pejabat Fungsional Penilai PBB untuk melaksanakan penelitian terhadap Klasifikasi dan besarnya NJOP;
- b. Pejabat Fungsional Penilai PBB melakukan penelitian terhadap Konsep dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pendaftaran Daftar Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek sebagai Dasar Pengenaan PBB;

- c. Kepala Seksi Pendaftaran meneliti konsep Daftar Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek sebagai Dasar Pengenaan PBB dan memerintahkan Pelaksana untuk menyusun konsep Surat Keputusan Bupati dan Lampiran;
- d. Pelaksana Seksi Pendaftaran membuat konsep Surat Keputusan Bupati dan Lampiran tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar pengenaan PBB dan meneruskan kembali kepada Kepala Seksi Pendaftaran untuk diteliti;
- e. Kepala Seksi Pendaftaran meneliti konsep Surat Keputusan Bupati dan Lampiran tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP dan meneruskan ke Kabid;
- f. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan meneliti, memaraf konsep Surat Keputusan Bupati dan Lampiran tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- g. Kepala Dinas Pendapatan meneliti, memaraf konsep Surat Keputusan Bupati dan Lampiran tentang dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB dan meneruskan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan Nota Dinas;
- h. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dan Lampiran Surat Keputusan Bupati serta mengembalikan ke Dinas Pendapatan untuk ditindak lanjuti;
- i. Kepala Dinas Pendapatan memerintahkan Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan melakukan penatausahaan;
- j. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan memerintahkan Kepala Seksi Pendaftaran untuk dilakukan penatausahaan, selanjutnya diteruskan kepada seluruh Bidang terkait untuk diketahui bersama;
- k. Kepala Seksi Pendaftaran menugaskan pelaksana untuk menatausaha Surat Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dan Lampiran Surat Keputusan Bupati dan meneruskan kepada semua Bidang terkait;
- l. Proses Selesai

G. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan

H. Bagan Arus (Flow Chart) :



BUPATI PASAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002